

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen untuk melihat tingkat keberhasilan proses dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD Tahun sebelumnya dan sekaligus sebagai dasar untuk menentukan langkah- langkah perbaikan dimasa datang. Evaluasi didasarkan pada data yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sebelumnya (Renstra SKPD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misinya serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Nganjuk.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Evaluasi Internal ini adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan evaluasi BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Melihat keberhasilan kinerja BPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Nganjuk.
2. Dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BPKAD Kabupaten Nganjuk.

BAB II

EVALUASI HASIL KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu "Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" maka pada Tahun 2021 ditetapkan 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Adapun jumlah anggaran program dan kegiatan yang mendukung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi per Kegiatan

No.	Urusan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran Th. 2021	Realisasi s.d TW II	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Keuangan			468.976.620.203	446.569.422.534	95.22%
		Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	7,339,046,155	6,212,463,501	84.65%
		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	20,000,000	19,393,450	96.97%
		Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja/Perubahan Renja) Perangkat Daerah yang tersusun	5,000,000	4,545,150	90.90%
		Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan pelaksanaan Renja perangkat daerah yang tersusun	7,500,000	7,447,450	99.30%
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja, LPPD, LKPJ Perangkat Daerah yang tersusun	7,500,000	7,400,850	98.68%

		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan</i>	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	6,416,526,405	5,426,337,122	84.57%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	6,408,526,405	5,419,128,972	84.56%
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5,000,000	4,739,000	94.78%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	3,000,000	2,469,150	82.31%
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD</i>	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	150,803,400	119,069,278	78.96%
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang terlaksana	52,894,100	47,472,478	89.75%
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana	97,909,300	71,596,800	73.13%
		<i>Kegiatan Administrasi Umum</i>	Hasil survei kepuasan masyarakat	183,778,250	153,418,170	83.48%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tercukupi	2,000,000	1,532,900	76.65%

		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK, makanan dan minuman harian pegawai, bahan pembersih yang tercukupi	56,633,250	54,620,337	96.45%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tercukupi	20,000,000	16,818,550	84.09%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	3,000,000	2,540,000	84.67%
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tercukupi	5,000,000	4,370,650	87.41%
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tercukupi Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang tercukupi	90,145,000	67,067,733	74.40%
		Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip yang terlaksana	7,000,000	6,468,000	92.40%
		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Barang Milik Daerah penunjang kelancaran pelaksanaan tugas	341,339,500	136,895,000	96,86%

		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Komputer/PC yang tercukupi Jumlah laptop yang tercukupi Jumlah LCD Proyektor yang tercukupi Jumlah UPS yang tercukupi	141,339,500	136,895,000	96.86%
		<i>Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jasa penunjang kelancaran pelaksanaan tugas	158,400,000	145,513,134	91.86%
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman paket yang tercukupi Jumlah surat keluar yang terdistribusi Jumlah surat masuk yang tercatat Jumlah tera cek yang tercukupi	3,000,000	1,553,960	51.80%
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan internet yang terbayar Jumlah tagihan listrik yang terbayar Jumlah tagihan telepon yang terbayar	110,400,000	99,409,178	90.04%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tagihan jasa kebersihan kantor yang terbayar	45,000,000	44,550,000	99.00%
		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Barang Milik Daerah yang terpelihara baik	268,198,600	211,837,347	78.99%

		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah BBM dan pelumas kendaraan dinas operasional yang tercukupi Jumlah pajak STNK kendaraan dinas ops R2 yang terbayar Jumlah pajak STNK kendaraan dinas ops R4 yang terbayar Jumlah suku cadang dan biaya service kendaraan dinas ops yang tercukupi	126,560,600	95,520,347	75.47%
		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara baik	2,000,000	2,000,000	100%
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah AC yang terpelihara baik Jumlah komputer/PC yang terpelihara baik Jumlah laptop yang terpelihara baik Jumlah printer yang terpelihara baik Jumlah server yang terpelihara baik Jumlah LCD yang terpelihara baik	107,465,000	91,215,000	84.88%

		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung tempat kerja yang terpelihara baik Jumlah honorarium tenaga administrasi yang terbayar	32,173,000	23,102,000	71.81%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan dan akuntabel	460,858,564,648	439,784,529,602	95.43%
		<i>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan P. APBD)	841,840,000	688,895,138	81.83%
		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup, SE, SB, Perbup yang tersusun Jumlah Raperda APBD, nota, jawaban, perda yang tersusun	349,700,000	278,484,150	79.64%
		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah Perbup P.APBD, SE yang tersusun Jumlah Perda P.APBD nota jawaban perda yang tersusun	492,140,000	410,410,988	83.39%
		<i>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	Persentase OPD yang mengajukan SPM sesuai ketentuan	285,444,950	275,650,340	96.57%

		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SKPP yang terproses dan diterbitkan Jumlah dokumen SP2D yang terproses Jumlah dokumen SPP, SPM, SP2D Non Anggaran yang terproses Jumlah Pengelolaan Kas Daerah yang terlaksana	285,444,950	275,650,340	96.57%
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer yang terlaksana	0	0	0.00%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait yang terlaksana	0	0	0.00%
		<i>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	Ketepatan waktu penyusunan LKPD	529,801,900	419,256,058	79.13%

		Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terlaksana	0	0	0.00%
		Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban yang terlaksana	41,675,400	27,702,450	66.47%
		Koordinasi Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran bulanan yang tersusun Jumlah laporan realisasi anggaran tribulan yang tersusun Jumlah laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya yang tersusun	43,957,000	37,683,250	85.73%

		<p>Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah buku perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 beserta lampirannya Jumlah buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 beserta lampirannya Jumlah buku raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten beserta lampirannya Jumlah buku Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ta 2020 beserta lampirannya Jumlah CD Perda dan Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 beserta lampirannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020</p>	435,744,900	348,895,058	80.07%
--	--	--	---	-------------	-------------	--------

		Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah sinkronisasi dan penyelesaian TPTGR yang tertangani	8,420,600	4,975,300	59.08%
		<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Persentase pengelolaan bantuan keuangan , dana darurat dan mendesak serta dana bagi hasil sesuai peraturan perundang-undangan	459,090,820,798	438,319,201,666	95.48%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan	398,873,704,469	398,873,368,569	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah belanja bantuan tidak terduga yang tersalurkan	46,197,242,029	25,426,322,197	55.04%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah belanja bagi hasil yang tersalurkan	14,019,874,300	14,019,510,900	100%
		<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	Jumlah pengelolaan data dan SIPD lingkup keuangan daerah yang terlaksana	120,657,000	81,526,400	67.57%
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan SIPD bidang Keuangan yang terlaksana	120,657,000	81,526,400	67.57%
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	768,949,400	572,429,431	74.44%

		<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Persentase Tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	768,949,400	572,429,431	74.44%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah kebutuhan BMD setiap OPD yang terdata	6,752,300	4,533,600	67.14%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang akurat	299,663,050	253,259,500	84.51%
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	324,221,600	214,273,585	66.09%
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang mempunyai nilai wajar	34,140,050	26,353,440	77.19%
		Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanggankan Jumlah data BMD yang dihapuskan Jumlah PAD yang meningkat	104,172,400	74,009,306	71.05%
	JUMLAH			468,976,620,203	446,569,422,534	95.22%

Dari data tabel diatas memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian realisasi anggaran target program dan kegiatan di BPKAD Tahun 2021 dengan predikat "**Sangat Tinggi**" dengan penyerapan anggaran sebesar 95,22%.

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi Anggaran Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

I. Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.4.545.150,- atau 90,90%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja perangkat daerah, Rancangan P. RKPD Tahun 2021.

2. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.447.450,- atau 99,30%. Kegiatan ini digunakan untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

3. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.400.850,- atau 98,68%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan LKjIP, LKPJ dan LPPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.408.526.405,- dan telah terealisasi sebesar Rp.5.419.128.972,- atau 84,56%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 48 orang dalam 1 tahun anggaran.

2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.4.739.000,- atau 94,78%. Kegiatan ini

digunakan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.469.150,- atau 82,31%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

3) Kegiatan Administrasi kepegawaian

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.52.894.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp.47.472.478,- atau 89,75%. Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.97.909.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp.71.596.800,- atau 73,13%. Kegiatan ini digunakan untuk pendampingan SIMDA Keuangan versi 29.2.9.0.5 5 oleh BPKP Perwakilan Prop. Jatim

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp1.532.900,- atau 76,65%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk kantor BPKAD

2. Penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.56.633.250,- dan telah terealisasi sebesar Rp.54.620.337,- atau 96,45%. Kegiatan ini

digunakan untuk penyediaan ATK, bahan pembersih dan makanan minuman harian pegawai selama 12 bulan

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.16.818.550,- atau 84,09%. Kegiatan ini digunakan untuk belanja cetak buku Permendagri No. 77 Tahun 2020 sebanyak 10 eksemplar

4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.540.000,- atau 84,67%. Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran belanja surat kabar selama 12 bulan

5. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.4.370.650,- atau 87,40%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan

6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.90.145.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.67.067.733,- atau 74,40%. Kegiatan ini digunakan untuk perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah selama 12 bulan

7. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.6.468.000,- atau 92,40%. Kegiatan ini digunakan untuk pengelolaan dan pendokumentasian arsip

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.141.399.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp.136.895.000,- atau 96,81%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan komputer/PC, laptop, UPS, LCD dan AC

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.553.960,- atau 51,80%. Kegiatan ini digunakan untuk belanja materai dan buku terra cek

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.110.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.99.409.174,- atau 90,04%. Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran rekening telepon, listrik dan internet selama 12 bulan

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.44.550.000,- atau 99,00%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan jasa kebersihan gedung kantor selama 12 bulan

6). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.126.560.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp.95.520.347,- atau 75,47%. Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala, penyediaan BBM dan pelumas serta biaya pajak kendaraan bermotor selama 12 bulan

2. Pemeliharaan mebel

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan mebeleur kantor

3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.107.465.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.91.215.000,- atau 84,90%. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor dan peralatan gedung kantor.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.32.173.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.23.102.000,- atau 71,81%. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala dan pembayaran honorarium THL BPKAD selama 12 bulan

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.349.700.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.278.484.150,- atau 79,63%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Raperda tentang APBD dan Perda tentang APBD, SE penyusunan RKA, Nota Keuangan dan Standart Biaya

2. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.492.140.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.410.410.988,- atau 83,39%.

Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Raperda tentang P. APBD dan Perda tentang P. APBD, SE penyusunan RKAP, Nota Keuangan serta Perbup penjabaran P. APBD

2). Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.285.444.950,- dan telah terealisasi sebesar Rp.275.650.340,- atau 96,57%. Kegiatan ini digunakan untuk penerbitan SKPP, SP2D, SPP, SPM, SP2D Non Anggaran dan pengelolaan kas umum daerah.

2. Koordinasi fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.25.920.450,- dan dilakukan penundaan kegiatan karena refocussing anggaran

3. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.32.342.200,- dan dilakukan penundaan kegiatan karena refocussing anggaran

3). Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Koordinasi Pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.32.600.200,- dan dilakukan penundaan kegiatan karena refocussing anggaran

2. Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.41.679.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp.27.702.450,- atau 66,47%. Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi

aset, kewajiban, ekuitas, realisasi, pendapatan dan belanja serta pendapatan LO dan beban

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.43.957.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.37.683.250,- atau 85,73%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya.
 4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.435.744.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp.348.895.058,- atau 80,07%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perda pertanggungjawaban APBD beserta lampirannya dan penyusunan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD
 5. Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.8.420.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp4.975.300,- atau 59,61%. Kegiatan ini digunakan untuk Koordinasi dengan BPK terkait penyelesaian kerugian daerah dan laporan semester II
- 4) Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:
1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.398.873.704.469,- dan telah terealisasi sebesar Rp.398.873.368.569,- atau 99,99%. Kegiatan ini digunakan untuk verifikasi penyaluran Anggaran Dana Desa dan Dana Desa sebanyak 264 Desa

2. Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.46.197.242.029,- dan telah terealisasi sebesar Rp.25.426.322.197,- atau 55,04%. Kegiatan ini digunakan untuk penyaluran belanja tidak terduga

3. Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.14.019.874.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp.14.019.510.900,- atau 99,99%. Kegiatan ini digunakan untuk penyaluran belanja bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.

5) Kegiatan Pengelolaan Data dan implementasi sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah

Subkegiatan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.657.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.81.526.400,- atau 67,57%. Kegiatan ini digunakan untuk implementasi Penatausahaan SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.752.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp.4.533.600,- atau 67,14%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan cetak SK RKBMD 52 OPD

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.299.663.050,- dan telah terealisasi sebesar Rp.253.259.500,- atau 84,52%. Kegiatan ini digunakan untuk penambahan fitur/menu RKBMD pada aplikasi SIM ASET

3. Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.324.221.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp.214.273.585,- atau 66,09%. Kegiatan ini digunakan pelaksanaan pengajuan ukur tanah di bawah jalan dan FGD dengan BPN

4. Penilaian Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.34.140.050,- dan telah terealisasi sebesar Rp.26.353.440,- atau 77,19%. Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan penilaian oleh Tim KPKNL

5. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.104.172.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp.74.009.306,- atau 71,05%. Kegiatan ini digunakan untuk rekon setoran sewa tanah, pembuatan perjanjian surat sewa tanah dan pemusnahan BMD Puskesmas

EVALUASI KINERJA TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra 2018	TARGET 2021	REALISASI sd TW II 2021	CAPAIAN	KET
1	Persentase Kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Persentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Dari Tabel diatas dapat dipresentasikan bahwa untuk pencapaian kinerja BPKAD telah ” **tercapai**”.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja BPKAD mempunyai inovasi program/kegiatan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- a. Penyempurnaan sistem prosedur dan manajemen serta meningkatkan kemampuan SDM melalui bimtek, Kursus, Workshop dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
- b. Sesuai amanat Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan masih ditemukan banyak kendala dalam pengaplikasian system antara lain penatausahaan keuangan daerah sehingga masih diperkenankan untuk menggunakan pendampingan aplikasi lain (SIMDA) dengan catatan melakukan perekaman data ke dalam aplikasi SIPD.

- c. Penerapan sanksi terhadap OPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan OPD sesuai dengan PP No 8 Tahun 2006 berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana

BAB III

PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap beberapa program dan kegiatan Tahun 2021 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara target dan realisasi capaian kinerja mendapat predikat **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian kinerja 95,22%.

Dalam kaitan dengan indikator kinerja utama BPKAD dapat tercapai 100%, sebagaimana berikut :

1. Persentase Kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD dapat tercapai 100%;
2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi dapat tercapai 100%;
3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D dapat tercapai 100%;
4. Persentase Laporan barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi tercapai 100%.

Pada dasarnya pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk telah terlaksana dengan baik.

Nganjuk, 7 Pebruari 2022


KERALA BPKAD
KAB. NGANJUK
KARTIMAH, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640505 198703 2 012